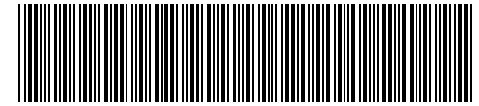




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099170/2025**



DS:4741-4155-8729-9061

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**Revisi ke 01**

Tanggal : 22 Februari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi : (06) ACEH
4. Kode>Nama Satker : (099170) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
- Sebesar : Rp. 449.145.000 ( EMPAT RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 449.145.000  
Rp. 449.145.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	449.145.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDA ACEH (001) Rp. 449.145.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
SUAHASIL NAZARA  
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099170/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4741-4155-8729-9061

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (06) ACEH  
Kode>Nama Satker : (099170) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Halaman : I A. 1

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			449.145.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			449.145.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.AEA	Koordinasi	6,00	kegiatan	208.860.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	6,00	kegiatan	208.860.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	449,00	Perkara, Berkas Perkara	133.443.000
Rincian Output	:	01 BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	378,00	Perkara	96.213.000
		02 BCA.U04	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat	64,00	Perkara	29.085.000
		03 BCA.U05	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Barat	7,00	Perkara	8.145.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	96,00	Orang	44.000.000
Rincian Output	:	01 QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	96,00	Orang	44.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	92,00	Perkara, Berkas Perkara	62.842.000
Rincian Output	:	01 QCA.001	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (PN)	4,00	Perkara	1.440.000
		02 QCA.002	Sidang di luar Gedung Pengadilan (PN)	88,00	Perkara	61.402.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR : DIPA- 005.03.2.099170/2025**

**I B. SUMBER DANA**



DS:4741-4155-8729-9061

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
 Provinsi : (06) ACEH  
 Kode>Nama Satker : (099170) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	449.145.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	449.145.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099170/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



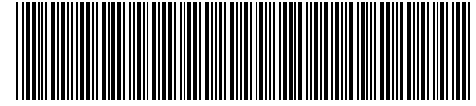
DS:4741-4155-8729-9061

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (06) ACEH  
Kode>Nama Satker : (099170) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099170	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	-	449.145	-	-	-	449.145		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	449.145	-	-	-	449.145		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	449.145	-	-	-	449.145		
1049.AEA	Koordinasi (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	208.860	-	-	-	208.860	06 . 51	
01	RM	-	208.860	-	-	-	208.860	001@	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	133.443	-	-	-	133.443	06 . 51	
01	RM	-	133.443	-	-	-	133.443	001@	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	44.000	-	-	-	44.000	06 . 51	
01	RM	-	44.000	-	-	-	44.000	001	
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	62.842	-	-	-	62.842	06 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099170/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4741-4155-8729-9061

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (06) ACEH  
Kode>Nama Satker : (099170) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH  
Kewenangan : (KD)

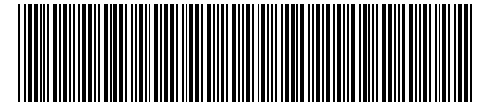
Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	62.842	-	-	-	62.842	001@	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>449.145</b>	-	-	-	<b>449.145</b>		

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099170/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4741-4155-8729-9061

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (06) ACEH  
Kode>Nama Satker : (099170) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

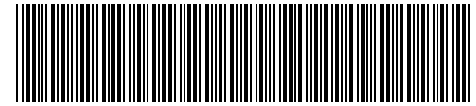
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099170	<b>PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	312	42.352	38.687	44.074	44.068	44.072	31.654	31.654	31.659	46.851	46.821	46.941	449.145
		<b>BELANJA BARANG</b>	312	42.352	38.687	44.074	44.068	44.072	31.654	31.654	31.659	46.851	46.821	46.941	449.145
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	312	42.352	38.687	44.074	44.068	44.072	31.654	31.654	31.659	46.851	46.821	46.941	449.145
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	312	42.352	38.687	44.074	44.068	44.072	31.654	31.654	31.659	46.851	46.821	46.941	449.145
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.493	53.707
		- PNB (425231)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	20
		- PNB (425232)	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	398	4.710
		- PNB (425233)	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.188	14.245
		- PNB (425239)	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.898	34.732

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099170/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:4741-4155-8729-9061

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [06] ACEH  
Kode dan Nama Satker : [099170] PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

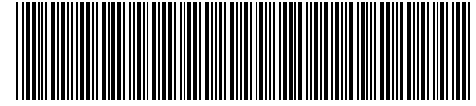
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>099170</b>	<b>PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH</b>		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 554
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 254.681		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	52 Belanja Barang Rp. 254.681		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
<b>005.03.BF</b>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>1049.QCA</b>	<b>Perkara Hukum Perseorangan</b>
<b>1049</b>	<b>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>		521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM)
<b>1049.AEA</b>	<b>Koordinasi</b>		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 173.952		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 750		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.083
<b>1049.BCA</b>	<b>Perkara Hukum Perseorangan</b>		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.010		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 583
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.093		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.536		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099170/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:4741-4155-8729-9061

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [06] ACEH  
Kode dan Nama Satker : [099170] PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002